

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada dasarnya merupakan proses multidimensi yang melibatkan perubahan struktur sosial, perubahan sikap hidup masyarakat, dan perubahan lembaga-lembaga negara. Pembangunan juga mencakup perubahan tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan, dan penghapusan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, pembangunan suatu negara dapat difokuskan pada tiga aspek utama. Ketiga aspek tersebut adalah: meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok masyarakat, meningkatkan standar hidup masyarakat, dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengakses kegiatan ekonomi dan sosial dalam kehidupannya (Todaro, 2011).

Pembangunan Ekonomi adalah suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita dengan cara mengelola ekonomi potensial yang ada menjadi ekonomi riil melalui penggunaan teknologi, dengan melakukan penanaman modal, peningkatan keterampilan, penambahan pengetahuan, serta kemampuan berorganisasi dan manajemen (Sadono Sukirno, 1996). Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita (Suparmoko, 2002). Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolok ukur adalah pertumbuhan ekonomi.

Menurut Ali Ibrahim Hashim (2016) pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan keadaan ekonomi suatu negara. Seiring berjalannya waktu, keadaan ekonomi suatu negara terus berkembang menuju keadaan yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi suatu negara membutuhkan tiga elemen dasar: peningkatan pasokan barang secara terus menerus, teknologi canggih menentukan tingkat peningkatan pasokan berbagai barang. Hal ini menentukan tingkat peningkatan pasokan berbagai barang kepada penduduk. Penyebaran dan penggunaan teknologi yang efektif membutuhkan koordinasi kelembagaan dan ideologi, memastikan bahwa inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi manusia digunakan dengan tepat.

Sukirno (2015) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang mengakibatkan meningkatnya produksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi merupakan alat ukur untuk mengidentifikasi kondisi ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilihat dari nilai produk domestik Regional bruto (PDRB), PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode (Sasana, 2006). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator penting yang menentukan kondisi perekonomian suatu daerah selama periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan di gunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun (Sukirno, 2000) sedangkan menurut Badan Pusat Statistik Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku

digunakan untuk menunjukkan besarnya struktur perekonomian dan peranan sektor ekonomi. Peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan cerminan pertumbuhan ekonomi disuatu negara (Blanchard, o., & Johnson, 2013). Nilai PDRB yang tinggi berarti menunjukkan tingginya aktivitas produksi barang dan jasa di wilayah tersebut.

Sumatera Utara merupakan provinsi yang terletak dibagian utara pulau sumatera. Provinsi Sumatera Utara beribukota Medan dengan luas wilayah sejauh 72.981,23 km². Provinsi Sumatera Utara menjadi provinsi dengan jumlah penduduk terbesar keempat di Indonesia, setelah provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Berdasarkan data tahun 2022 penduduk Sumatera Utara berjumlah 15.372.437 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 191 jiwa/km² yang pada saat ini juga selalu mengupayakan kesuksesan pembangunan ekonomi dan peningkatan pertumbuhan ekonominya. Adapun kondisi perekonomian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 sampai 2023 berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan jumlah PDRB Atas Dsara Harga Konstan yaitu sebagai berikut:





Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, Diolah 2023

Gambar 1. 1 PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHK

Berdasarkan gambar 1.1 diatas dapat dilihat bahwa PDRB Sumatera Utara mengalami peningkatan yang berkelanjutan dari tahun ke tahun tanpa adanya fluktuasi yang bersifat signifikan. Pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2019 PDRB Sumatera Utara mengalami peningkatan yang bertahap atau bersifat kontinuitas, dimana pada tahun 2011 PDRB Sumatera Utara sebesar Rp.353147,59 (Miliar) yang kemudian mengalami peningkatan secara bertahap dengan rata-rata penningkatan sebesar 0.05% setiap tahunnya sampai pada tahun 2019. Namun di tahun 2020 jumlah PDRB mengalami penurunan sebesar Rp. 533746,36 (Miliar).

PDRB Sumatera Utara mengalami penurunan sebesar 0.01% di tahun 2020 yang disebabkan oleh keadaan COVID-19. Pengaruh COVID-19 sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia terkhusus di Sumatera Utara sampai pada tahun 2022. Dan pada tahun 2023 keadaan pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 mulai kembali meningkat sebesar 0.05% dari tahun sebelumnya dimana peningkatan ini dipengaruhi oleh keadaan masa COVID-19

yang sudah berakhir.

Berdasarkan data BPS Sumatera Utara, terdapat perbedaan jumlah produk domestik regional bruto antar Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara. Seperti halnya di tahun 2022, PDRB tertinggi terdapat pada Kota Medan yaitu sebesar 165.120,01 miliar rupiah. Sedangkan jumlah PDRB terendah yaitu berada pada Kabupaten Pakpak Barat yaitu dengan jumlah 909.62 miliar rupiah. Besarnya ketimpangan PDRB antar Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara memperlihatkan bahwa terdapat wilayah yang memiliki kinerja perekonomian yang kurang maksimal sehingga mempengaruhi jumlah PDRB Sumatera Utara.

Kemudian apabila dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain yang terdapat di Indonesia jumlah PDRB Sumatera Utara menempati urutan kelima dengan jumlah PDRB tertinggi sepanjang tahun 2018-2022, berada di bawah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur dan DKI Jakarta. Namun meskipun Provinsi Sumatera Utara menempati urutan ke lima dengan jumlah PDRB tertinggi di Indonesia, jumlah PDRB Sumatera Utara memiliki perbedaan yang cukup tinggi dibandingkan dengan empat provinsi di atasnya.

Seperti halnya ditahun 2018 Jawa Tengah memiliki jumlah PDRB sebesar 893.750,3 miliar rupiah sedangkan Provinsi Sumatera Utara memiliki jumlah PDRB hanya sebesar 487.531,23 miliar Rupiah. Sehingga hal tersebut memperlihatkan bahwa PDRB di Sumatera Utara belum cukup baik sehingga diperlukan upaya untuk peningkatan PDRB Sumatera Utara. Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi (PDRB) terdapat beberapa faktor – faktor atau komponen-komponen pokok yang sangat penting yaitu meliputi, akumulasi modal,

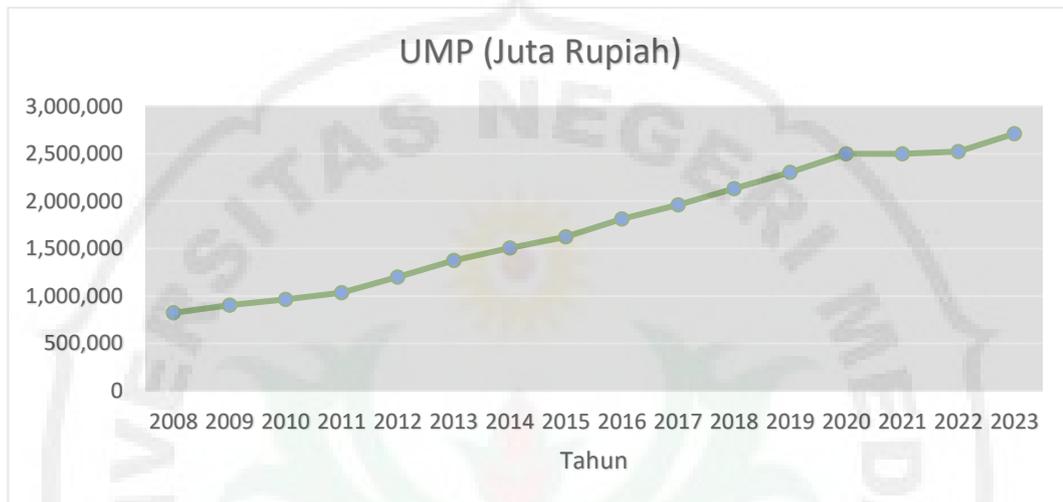
Pertumbuhan penduduk yang juga meliputi pertumbuhan dalam angkatan kerja, kemajuan-kemajuan dibidang teknologi (Todaro, 1995).

Menurut teori Neo-Klasik yang dikembangkan oleh Sollow-Swan, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi. Dalam hal ini laju pertumbuhan ekonomi dapat tercapai tergantung pada perkembangan teknologi, tenaga kerja dan modal (Sukirno, 2016). Beberapa penyebab Perkembangan PDRB Salah satunya adalah Upah Minimum Provinsi (UMP). (Devanto dan Putu, 2011) mengatakan bahwa upah minimum merupakan penghasilan minimum yang diberikan perusahaan secara tunai kepada karyawannya atas pekerjaan atau jasa yang akan atau telah dilakukan serta ditentukan atas dasar peraturan perundang-undangan dan dibayar berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan karyawan.

Upah minimum telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.05/Men/1989 tentang upah minimum. Tingkat upah minimum ditentukan setiap tahun dengan kebijakan pengupahan yang dibuat oleh pemerintah pusat untuk memastikan terciptanya kehidupan yang layak dan dengan memperhitungkan kondisi tenaga kerja, produktivitas, pertumbuhan ekonomi dan juga tingkat inflasi pada wilayah tersebut. Upah Minimum Provinsi (UMP) berlaku untuk satu provinsi tersebut.

Wilayah atau daerah yang berbeda menjadi salah satu indikator yang membuat tingkat upah berbeda. Daerah yang berpenghasilan tinggi akan berdampak signifikan terhadap pendapatan pekerja karena terdapat banyak perusahaan yang berkembang di wilayah tersebut. Kualitas yang dimiliki seseorang

juga dapat mempengaruhi partisipasinya terhadap perusahaan, dan upah yang diterima.



Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, Diolah 2023

Gambar 1. 2 Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara

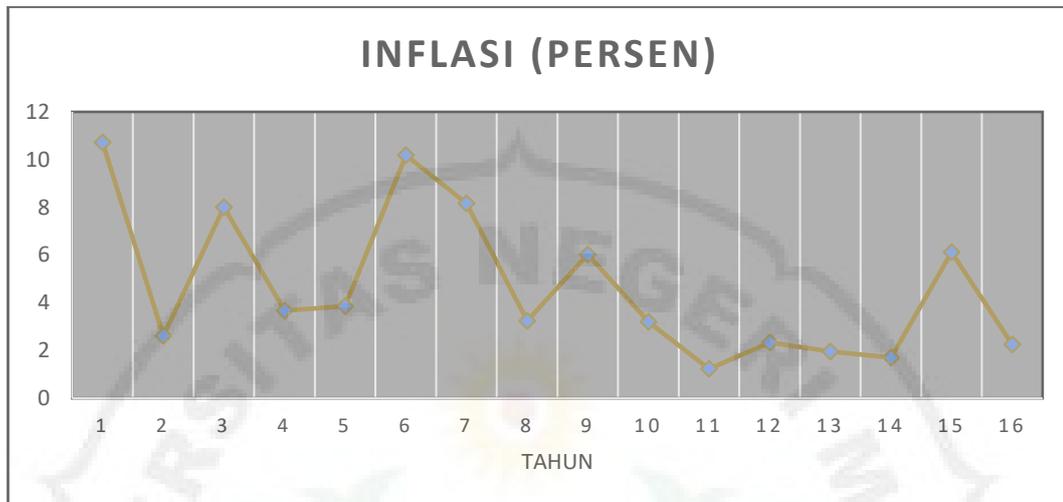
Berdasarkan grafik 1.2 diatas dapat dilihat bahwa Upah Minimum Provinsi di Sumatera Utara (UMP) mengalami peningkatan yang bersifat kontinuitas dari tahun 2008-2023. Menurunnya jumlah UMP terjadi pada tahun 2020 dan sampai pada tahun 2021 UMP tetap sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 2499423. Hal tersebut diakibatkan oleh karena keadaan Indonesia khususnya Sumatera Utara masih dalam pemulihan dari krisis COVID-19, dan apabila upah dinaikkan hal tersebut akan memberatkan dunia usaha atau setiap Perusahaan.

Selain itu pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh tingkat inflasi. Inflasi yaitu keadaan naiknya harga-harga pada suatu perekonomian (Sadono Sakirno, 2016:15). Inflasi disebabkan oleh beberapa faktor yang berpengaruh, seperti jumlah uang beredar. Semakin banyak mata uang yang beredar di wilayah

tersebut, semakin lemah nilai tukar (daya beli) dan semakin tinggi harga barang kebutuhan sehari-hari. Inflasi merupakan indikator yang sangat penting dalam pengaturan dan pengendalian ekonomi makro dan memiliki dampak yang luas terhadap sektor ekonomi.

Terjadinya inflasi yang rendah mampu merangsang pertumbuhan ekonomi, sementara inflasi tinggi menghambat upaya pemerintah menyejahterakan masyarakat. Sehingga pengendalian inflasi menjadi hal penting bagi pemerintah untuk meminimalisir dampak negatif seperti menurunkan pendapatan masyarakat. Selain itu inflasi yang bergejolak akan membuat pelaku ekonomi memiliki rasa ketidakpastian (uncertainty) ketika memutuskan keputusan yang akan mengurangi pertumbuhan ekonomi.

Inflasi dapat mengakibatkan permasalahan bagi negara. Inflasi yang besar akan mengakibatkan Menurunnya nilai mata uang, naiknya harga, meningkatnya pengangguran, menurunnya kesejahteraan, hilangnya investasi, dan yang lainnya. Inflasi juga dapat mempengaruhi harga pasar dan kebutuhan sehari hari kita. Inflasi dapat dijadikan sebagai indikator adanya pengangguran, pertumbuhan ekonomi, tingkat ekspor, impor, dan kemiskinan. Terjadinya inflasi pada suatu Negara merupakan masalah perekonomian yang besar untuk dapat diselesaikan, hal ini dikarenakan perubahan harga bahan pokok yang begitu cepat tanpa dibarengi dengan bertambahnya pendapatan dan pada ujungnya akan berpengaruh pada PDRB. Berikut diagram Inflasi di Sumatera Utara:



Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, Diolah 2023

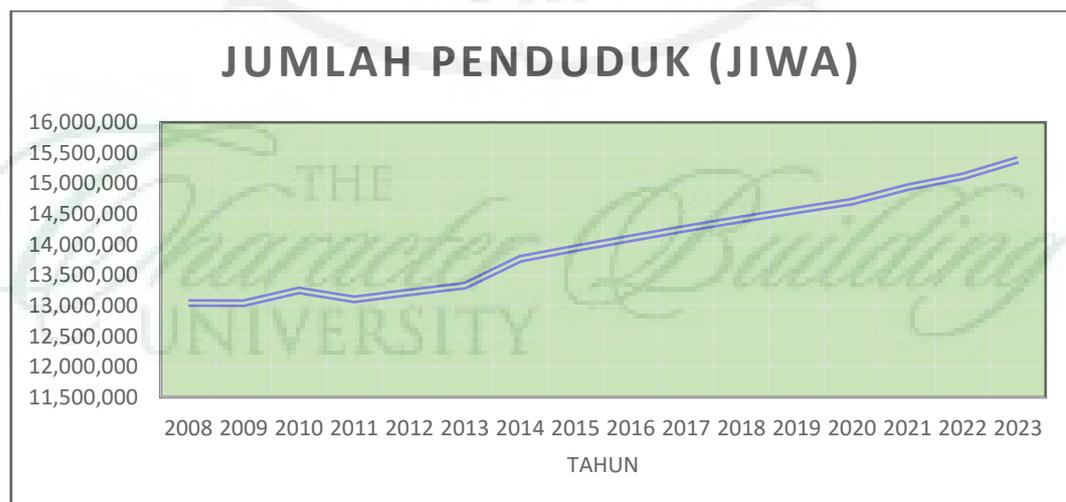
Gambar 1. 3 Laju Inflasi Sumatera Utara

Berdasarkan tabel 1.3 diatas dapat dilihat peningkatan inflasi setiap tahunnya bersifat fluktuatif. Dimana pada peningkatan inflasi yang tinggi terjadi dua kali yaitu pada tahun 2013 dan 2023. Pada tahun 2013 inflasi mengalami peningkatan sebesar 10.18% dimana tingkat inflasi ini naik sebanyak (..) dari tahun 2012, dan pada tahun 2023 inflasi mengalami peningkatan kembali sebesar 6,12% peningkatan ini dapat dilihat merupakan peningkatan yang drastis dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2022 dimana inflasi hanya sebesar 1,71%.

Dari grafik tersebut kita dapat melihat ketidakstabilan inflasi terjadi setiap tahunnya. Dilihat dari perannya, penduduk memiliki dua peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Penelitian Rafik dan Pahlevi (2020:301), menghasilkan bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh secara signifikan dan memiliki pengaruh positif terhadap PDRB Kota Banjarmasin. Dari segi permintaan, penduduk bertindak sebagai konsumen. Sedangkan dari segi penawaran penduduk bertindak sebagai produsen.

Oleh karena itu perkembangan penduduk yang cepat tidaklah selalu merupakan penghambat bagi jalannya pembangunan ekonomi, jika penduduk mempunyai kapasitas yang tinggi untuk menghasilkan dan menyerap hasil produksi yang dihasilkan. Ini berarti pertumbuhan penduduk yang tinggi harus disertai dengan tingkat penghasilan yang tinggi pula. Pertambahan penduduk dengan tingkat penghasilan yang rendah tidak ada artinya bagi pembangunan ekonomi.

Arjoso (2005), penambahan jumlah penduduk yang besar mempunyai implikasi yang sangat luas terhadap program pembangunan. Penduduk yang besar dengan kualitas sumber daya manusia yang relatif kurang memadai sangat berpotensi memberikan beban dalam pembangunan, yang tercermin dari beratnya beban pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyediakan berbagai pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, lapangan kerja dan lingkungan hidup. Berikut Diagram Jumlah Penduduk Sumatera Utara:



Sumber : BPS Sumatera Utara diolah (2023)

Gambar 1. 4 Pertumbuhan Jumlah Penduduk Sumatera Utara

Jumlah penduduk menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi PDRB. Dilihat dari tabel 1.3 di atas bahwa jumlah penduduk dari tahun mengalami peningkatan yang stabil dari tahun ke tahun. Tujuan dari pembangunan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan penduduk. Tingkat kesejahteraan penduduk dapat diukur dengan kenaikan PDRB per kapita. PDRB per kapita dihitung dengan membagi PDRB terhadap jumlah penduduk pertengahan tahun.

Berdasarkan serangkaian persoalan empiris, teoritis dan fenomena yang dipaparkan, peneliti tertarik untuk membahas serta melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Analisis Pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP), Inflasi dan Jumlah Penduduk terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Sumatera Utara”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah pengumpulan persoalan yang memiliki keterkaitan dengan persoalan yang diteliti. Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang, ditemukan masalah-masalah berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto yang terdapat pada Provinsi Sumatera Utara belum cukup baik, hal ini terlihat pada tahun 2018-2022 dan menempati urutan ke lima dengan jumlah PDRB tertinggi di Indonesia namun masih memiliki perbedaan yang cukup tinggi dibandingkan dengan empat provinsi di atasnya.
2. Upah Minimum Provinsi yang rendah akan memberikan dampak yang tidak baik pada perekonomian masyarakat.

3. Terjadi fluktuasi pada inflasi di Provinsi Sumatera Utara dari tahun ketahun, mengakibatkan harga barang tidak stabil.
4. Persebaran jumlah penduduk Sumatera Utara yang tidak merata antar wilayah kabupaten/kota.

1.3 Batasan Masalah

Sehubungan dengan luasnya cakupan masalah, (Sugiyono, 2017) mengatakan bahwa karena keterbatasan tenaga, keuangan, waktu, dan untuk lebih memperhatikan hasil penelitian, peneliti tidak meneliti seluruh objek atau situasi tertentu, tetapi menentukan fokus. Oleh karena itu penulis membatasi masalah menjadi:

1. Objek penelitian adalah Provinsi Sumatera Utara tahun 2011-2023

Penelitian ini mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi PDRB, yaitu bagaimana pengaruh UMP, INFLASI dan Jumlah Penduduk (JP) terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2011-2023

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan fokus penelitian yang perlu dikerjakan. Hal ini selaras dengan pandangan (Sugiyono, 2017) yang menyatakan bahwa rumusan masalah ialah pertanyaan penelitian berbasis masalah yang perlu diselesaikan melalui pengumpulan data. Sehingga rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Apakah ada pengaruh upah minimum provinsi terhadap produk domestik regional bruto di Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah ada pengaruh Inflasi terhadap produk domestik regional bruto di Provinsi Sumatera Utara?
3. Apakah ada pengaruh Jumlah Penduduk terhadap produk domestik regional bruto di Provinsi Sumatera Utara?
4. Apakah ada pengaruh UMP, Inflasi dan Jumlah Penduduk terhadap produk domestik regional bruto di Provinsi Sumatera Utara?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum provinsi terhadap produk domestik regional bruto di Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi terhadap produk domestik regional bruto di Provinsi Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk terhadap produk domestik regional bruto di Provinsi Sumatera Utara.
4. Untuk mengetahui pengaruh UMP, Inflasi, Jumlah Penduduk terhadap produk domestik regional bruto di Provinsi Sumatera Utara.

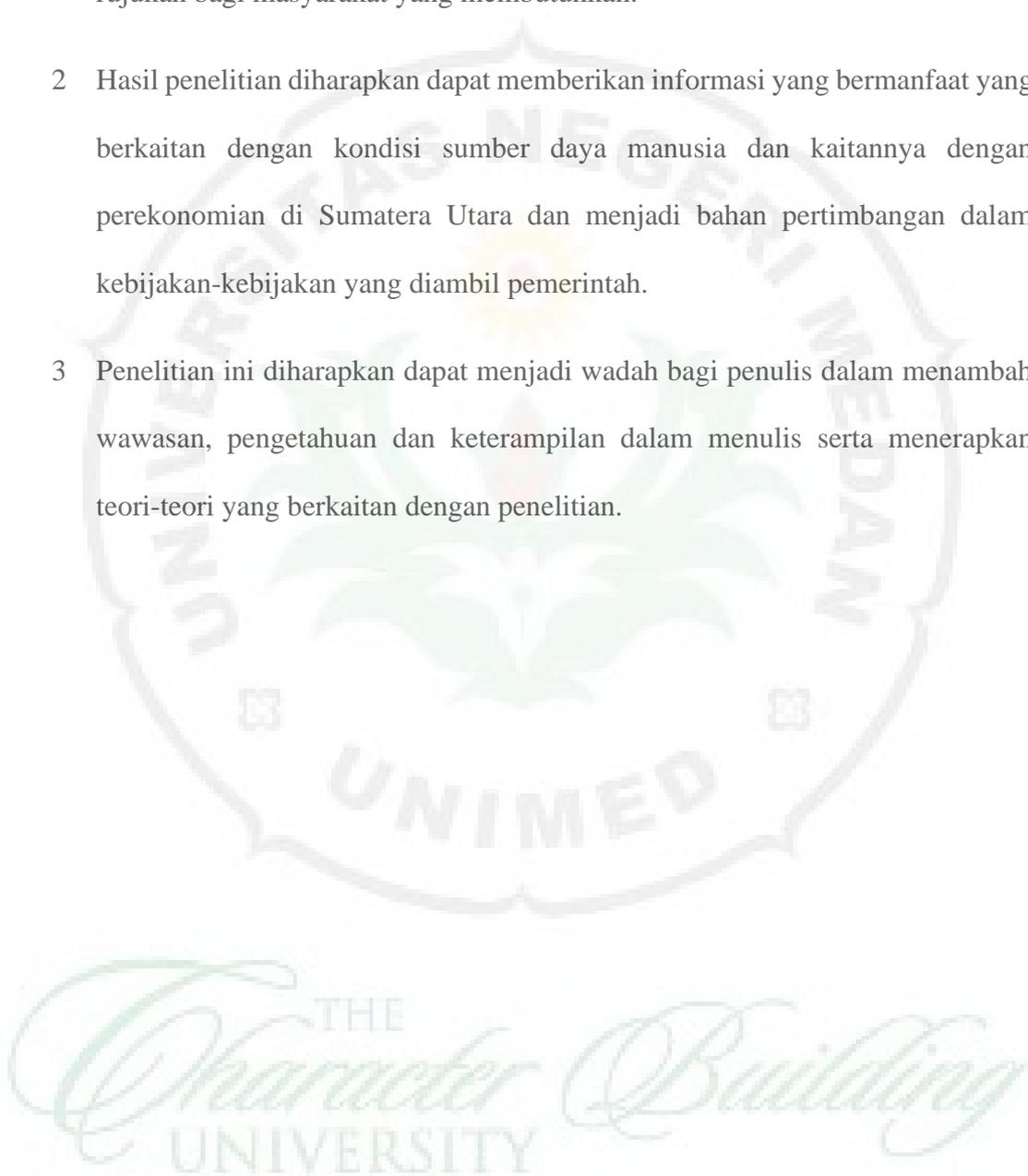
1.6 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian kiranya nanti bisa memberikan benefit sebagai berikut:

- 1 Hasil dari penelitian yang diharapkan dapat menjadi sumber pembelajaran yang bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan pengaruh upah minimum provinsi (ump), inflasi dan jumlah penduduk terhadap

produk domestik regional bruto di Provinsi Sumatera Utara serta dapat menjadi rujukan bagi masyarakat yang membutuhkan.

- 2 Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat yang berkaitan dengan kondisi sumber daya manusia dan kaitannya dengan perekonomian di Sumatera Utara dan menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah.
- 3 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi penulis dalam menambah wawasan, pengetahuan dan keterampilan dalam menulis serta menerapkan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian.



UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
UNIMED
THE
Character Building
UNIVERSITY